



Ribuan warga Kulonprogo 'ngalap berkah' dengan menyerbu 22 gunung pada puncak Upacara Adat Tradisi Nyadran Agung di Alun-alun Wates.

KR-Asrul Sani

## NYADRAN AGUNG DI ALUN-ALUN WATES Ribuan Warga Ngalap Berkah, Rayah 22 Gunung

RIBUAN warga Kabupaten Kulonprogo antusias mengikuti prosesi Upacara Adat Nyadran Agung di Alun-alun Wates, Selasa (14/3). Seusai Kepala Kantor Kementerian Agama Kulonprogo Wahib Jamil memimpin doa syukur dan keselamatan, tanpa dikomando warga merangsek maju menyerbu dan berebut ubarampe puluhan gunung hasil bumi, apem dan nasi.

Dalam sekejap, 22 gunung ludes dirayah warga. Kendati berdesakan dan rebutan isi gunung, tapi prosesi ngalap berkah itu berlangsung aman.

Prosesi Nyadran Agung diawali rombongan kirab membawa gunung dari halaman Gedung DPRD Kulonprogo menuju sisi Selatan Alun-alun Wates. Kemudian kirab bergerak ke arah Utara melintasi di antara dua pohon beringin di tengah-tengah Alun-alun Wates.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Huwono X mengatakan, rangkaian Nyadran Agung melibatkan tokoh agama, para pelaku budaya dan masyarakat mengandung makna pelestarian budaya juga ungkapan rasa syukur dengan ha-

rapan Tuhan Yang Maha Kuasa berkeinginan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya agar masyarakat Kulonprogo senantiasa mendapatkan rahmat, kesehatan dan selalu di jalan lurus dalam setiap tindakannya.

"Tepat rangkaian Nyadran Agung sebagai upaya pencerahan batin kolaboratif seiring upaya menyegarkan spiritualitas dan pelestarian budaya masyarakat," kata Gubernur DIY dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plt Asisten Pembedayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY Aris Eko Nugroho MSI.

Nyadran, tradisi Islam-Jawa yang intinya penghambaan mendekatkan dan menyerahkan diri kepada Allah. "Tradisi nyadran salah satu warisan budaya Islam-Jawa yang diajarkan Wali Sanga yang terangkai bagaikan sebuah untaian legenda, penuh ketakjuban dan sarat makna Keislaman. Wali Sanga dikenal bukan hanya penyebar Islam yang gigih dan produktif tapi juga perintis berbagai kegiatan kreatif tradisi dan seni Islami," jelas Sultan. (Asrul Sani)-f

### PERPANJANGAN ONLINE DENGAN E-SIGNAL

## Polri Kembangkan STNK Elektronik

BANDUNG (KR) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuturkan, saat ini Kepolisian Republik Indonesia sedang menggodok rencana pengembangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) elektronik, sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi digital.

"Hari ini diluncurkan e-Signal, ini pelayanan terhadap sistem perpanjangan untuk STNK. Dan ke depan kita akan rencanakan bahwa mungkin STNK ke depan menggunakan STNK elektronik setelah nanti kita kembangkan programnya," kata Kapolri usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembina Samsat, di Kota Bandung, Selasa (14/3).

Kapolri mengatakan, Kakorlantas Polri meluncurkan sejumlah pro-

gram demi meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat, salah satu program yang baru saja diluncurkan yakni aplikasi yang diberi nama Elektronik Samsat Digital (e-Signal). Lewat layanan tersebut, maka perpanjangan STNK oleh pengguna kendaraan dapat dilakukan secara online.

Selain itu, ke depan Polri juga sedang menyiapkan bentuk baru dari STNK dengan memanfaatkan sistem elektronik. "Saat ini perpanjan-

gannya menggunakan online tapi ke depan kita sedang mengarah ke perpanjangan online dan STNK elektronik, ini yang kita sedang siapkan," kata Kapolri.

Dalam aplikasi bernama e-Signal, terdapat beragam fitur yang bisa dimanfaatkan, termasuk memperpanjang STNK secara daring, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

Aplikasi Signal yang dapat masyarakat unduh melalui telepon pintar dan aplikasi ini memanfaatkan database, kendaraan bermotor yang dimiliki Polri, Pangkalan Data Induk Kependudukan yang ada pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta Sistem Informasi Pajak Kendaraan

Bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap Dinas Pendapatan Provinsi.

Hal itu diintegrasikan secara nasional sebagai sebuah sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menggunakan aplikasi berjenis mobile platform. Aplikasi mobile platform ini untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara digital sekaligus mengakomodir kepentingan berbagai pihak terkait seperti Dispenda, Jasa Raharja dan Bank Pembangunan Daerah.

Sistem aplikasi e-Signal memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi identitas pemilik ranmor dengan melakukan pencocokan wajah (face matching) pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kemendagri. (Ant/San)-f

### ANGKUTAN LEBARAN 2023 KAI Siapkan 303 Perjalanan Tambahan

JAKARTA (KR) - Sebanyak 303 perjalanan kereta api (KA) tambahan disiapkan pada masa angkutan Lebaran 2023. Kereta api yang berangkat dari area KAI Daop 1 Jakarta untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta-Solo Pulang Pergi (PP), Jakarta-Surabaya PP, Jakarta-Malang PP dan lainnya. "PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menyiapkan tiket KA tambahan untuk masa angkutan lebaran yang sudah mulai dijual sejak Senin (13/3) pukul 00.00," kata Kepala Humas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa di Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut Eva, pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Contact Center 121 dan berbagai mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI. Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api.

"Total masa Angkutan Lebaran 2023 selama 22 hari mulai 12 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023 adalah 1.513 perjalanan KA dengan 1.043.754 tempat duduk yang disediakan untuk keberangkatan awal KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen di area KAI Daop 1 Jakarta. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan KA tambahan yang akan dioperasikan pada masa Angkutan Lebaran 2023," ungkap Eva. (Ant/Has)-d

### KLARIFIKASI SOAL UANG PANGKAL Rektor UGM Ajak Dialog Mahasiswa

YOGYA (KR) - Rektor Universitas Gadjah Mada beserta kelima wakil rektor menemui dan berdialog dengan mahasiswa yang menyelenggarakan aksi di halaman Balai UGM Senin (13/3). Pada kesempatan itu, Rektor memberikan klarifikasi terkait biaya selain UKT yang rencananya mulai diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023/2024, yaitu Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU).

"Keliru kalau itu untuk semua. Sumbangan ada di mereka yang masuk dalam jalur Ujian Mandiri, dan satu lagi dia harus termasuk dalam orang yang mampu. Kira-kira dari total student body adalah 4,8 persen dari total mahasiswa, itu sudah kita lihat data simulasi dari yang tahun-tahun sebelumnya," terang Rektor UGM, Prof dr Ova Emilia MMedEd SpOG(K) PhD.

Rektor menegaskan, keberpihakan UGM kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi lemah dengan memberikan kesempatan kepada mereka memperoleh pendidikan terbaik di UGM melalui skema pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta berbagai jenis beasiswa yang tersedia.

"Kita semua concern dengan apa yang menjadi pemikiran atau kekhawatiran adik-adik. Di dalam konsepnya kita ingin berkeadilan, orang yang kurang tentunya harus kita bantu, jangan sampai ada kata-kata orang bisa DO gara-gara tidak punya uang," tegasnya.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Prof Supriyadi MSc PhD CMA CA Ak menerangkan, UGM akan menerapkan skema UKT Pendidikan Unggul bagi mahasiswa baru dari keluarga yang mampu secara ekonomi, sedangkan kelompok mahasiswa lainnya akan menerima UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi dengan besaran subsidi sebesar 25 persen, 50 persen, 75 persen, hingga 100 persen. (Dev)-f

## Biaya Haji Tak Bedakan Usia Jemaah

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak membedakan usia jemaah, apakah masuk kategori muda atau lanjut usia (lansia), penentuannya sesuai kesepakatan bersama DPR RI.

"Biaya haji (reguler) ini sama semua, tidak ada perbedaan antara muda dan tua. Ini juga sejalan dengan konsep *isitha'ah*, karena haji adalah kewajiban bagi mereka yang mampu," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Selasa (14/3).

Penegasan Hilman tersebut menepis pernyataan firma hukum Haris Azhar Law Office. Dalam keterangannya, Haris Azhar Law Office mendesak agar negara mengecualikan pembebasan biaya tambahan pelunasan haji pada jemaah calon haji lansia yang masuk kategori lunas tunda 1443 H/2022 Masehi sebesar Rp 9.400.000 dan jemaah haji lansia tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp 23.500.000.

"Semua proses pembahasan dana haji juga dilakukan terbuka, transparan dan akuntabel melalui mekanisme pembahasan bersama antara pemerintah dalam hal ini Kemenag bersama Komisi VIII DPR," kata Hilman.

Hilman menjelaskan, BPIH yang telah ditetapkan bersama DPR tidak semestinya diistilahkan sebagai pembe-

banan. Pasalnya, tidak semua BPIH itu dibayarkan sepenuhnya oleh jemaah calon haji. Dalam rapat kerja yang berlangsung pada 15 Februari 2023, Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati besaran BPIH 1444 H/2023 M dengan rata-rata Rp 90.050.637,26 per haji reguler.

Angka tersebut terdiri dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp 49.812.700,26 (55,3 persen) dan penggunaan nilai manfaat per anggota jemaah sebesar Rp 40.237.937 (44,7 persen).

Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan mencapai Rp 8 triliun. Selain itu, disepakati juga adanya afirmasi khusus bagi jemaah lunas tunda tahun 2020, sehingga dibutuhkan tambahan nilai manfaat mencapai Rp 845 miliar.

"Jadi dalam komposisi BPIH, jemaah sebenarnya hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dengan rata-rata 55,3 persen. Sisanya, anggaran diambilkan dari nilai manfaat dengan rerata 44,7 persen," katanya.

Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jemaah calon haji lansia yang akan berangkat cukup banyak. Dari 203.320 kuota haji reguler, diperkirakan sekitar 64 ribu di antaranya masuk kategori lansia. (Ati)-f

### KASUS PENGANIAYAAN DAVID LPSK Tolak Lindungi AG

JAKARTA (KR) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan AG (15) di kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17) oleh Mario Dandy Satrio (20). Namun, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari dua saksi kunci dalam kasus penganiayaan tersebut yakni R dan N yang merupakan orang tua Rz, teman dari sang korban.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, keputusan diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Penolakan itu, karena permohonan perlindungan AG tidak memenuhi syarat perlindungan. Salah satunya terkait Pasal 28 (1) huruf a dan huruf d UU 31/2014 yang mengatur syarat formulir perlindungan terhadap saksi dan korban.

Pasal 28 (1) huruf a sendiri mengatur sifat pentingnya keterangan saksi atau korban. "Sementara itu, Pasal 28 (1) huruf d terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban," jelas Hasto di Jakarta, Selasa (14/3).

Ia menegaskan, status hukum pemohon (AG) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak termasuk ke dalam subjek perlindungan LPSK yang diatur dalam Pasal 5 (3) UU No 31 Tahun 2014. Meski demikian, LPSK memberikan rekomendasi usai permohonan ditolak.

"LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan KPAI untuk mendampingi AG serta memastikan terpenuhinya hak-hak AG dalam proses peradilan pidana," tutur Hasto.

Rekomendasi dimaksud, menurutnya, berisikan agar kedua pihak dapat mendampingi AG dan memastikan terpenuhinya hak-hak AG dalam proses peradilan pidana sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Khususnya, pemohon sebagai anak berkonflik dengan hukum. (Fu)-f

### BARITO PUTERA PERMALUKAN DEWA UNITED Peringkat PSS Turun Lagi

TANGERANG (KR) - Peringkat PSS Sleman di papan klasemen sementara Liga 1 2022/2023 turun lagi. Laskar Sembada turun satu peringkat ke posisi 17 klasemen setelah Barito Putera secara mengejutkan memermalukan Dewa United di pekan ke 30, Selasa (14/3).

Berlangsung di Indomilk Arena Tangerang, Dewa United takluk 1-2 dari tim tamu Barito Putera. Kekuatan Barito Putera terlihat sejak menit pertama. Laskar Antasari berhasil unggul lebih dahulu menit 14 melalui gol Eksel Runtukahu.

Dewa United kesulitan menyamakan skor setelahnya. Dewa United baru bisa membalas menit 27 setelah pemain Barito Putera, Aditya Putra Dewa melakukan gol bunuh diri. Gol kemenangan Barito Putera disarangkan Gustavo

Tocantins pada menit ke 70.

Tambahan tiga poin, Barito Putera naik ke posisi 16 menggeser PSS yang harus turun satu peringkat. Barito Putera mengemas 31 poin hasil 29 pertandingan yang sudah dijalani. Sedang Dewa United menempati peringkat 13 dengan 33 poin.

Pada laga lainnya, Rans Nusantara makin terjepit di dasar klasemen setelah dipaksa menyerah oleh tuan rumah Persikabo 1973 dengan skor 1-0 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Gol kemenangan Persikabo 1973 disarangkan Bruno Dybal pada akhir babak pertama. Persikabo 1973 naik ke posisi 12 dengan 35 poin hasil 29 laga. Sedang Rans Nusantara tak beruntung di posisi terbawah dengan 18 poin hasil 30 pertandingan. (Yud)-f

YOGYA (KR) - Vonis pidana korupsi selama 7 tahun penjara telah berkekuatan hukum tetap setelah mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) menyatakan menerima. Jaringan Anti Korupsi (JAK) pun melayangkan surat pada Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan HB X, terkait posisi HS sebagai abdi dalem berpangkat Bupati Sepuh Kanjeng Mas Tumenggung H Kusumadipura.

"Kita menanyakan sikap Kraton Ngayogyakarta atas kasus HS selaku abdi dalem. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari institusi Kraton Ngayog-



KR-Istinewa

Jaringan Anti Korupsi (JAK) usai melayangkan surat kepada Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

yakarta Hadiningrat," tutur Tri Wahyu KH, perwakilan JAK Yogyakarta usai mengantar surat ke Kraton, Selasa (14/3).

Disebutkan, tahun 2014

saat menjabat Walikota Yogyakarta, HS mendapatkan kenaikan pangkat dari Bupati Anom menjadi Bupati Sepuh. "Merujuk amanah Sultan HB IX ba-

wa Tahta untuk Rakyat tentu tindakan korupsi yang dilakukan abdi dalem tersebut nyata-nyata melanggar amanah karena malah menciptakan Tahta untuk Korupsi," tegas Wahyu.

Aktivis lainnya Elanto menambahkan, korupsi tidak hanya menjadi tanggungjawab birokrasi pemerintahan tetapi juga ada tanggungjawab kultural atau budaya yang harus memiliki komitmen antikorupsi. "Karena itulah kami dari JAK mengirimkan surat ke Raja Yogyakarta agar memiliki komitmen antikorupsi, tidak hanya level birokrasi tetapi juga level kultural atau kebudayaan," ujarnya. (Vin)-f